

SKRIPSI
PELAKSANAAN HAK-HAK NARAPIDANA WANITA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B PADANG

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas

UNIVERSITAS ANDALAS

Oleh :

BAMBANG TRISISWOYO KURSAN

1410112058

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing I : Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.


Pembimbing II: Riki Afrizal, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

No. Reg 5159/PK-IV/III/2018

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: BAMBANG TRISISWOYO KURSAN	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Padang/ 1 September 1996 b) Nama Orang Tua: Rukmini c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Pidana e) No.Bp. : 1410112058	f) Tanggal Lulus : 17 Juli 2018 g) Predikat Lulus :Sangat Memuaskan h) IPK : 3.23 i) Lama Studi : 4 Tahun j) Alamat : Jl. Binuang Kampung Dalam, Pauh, Padang	

PELAKSANAAN HAK-HAK NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B PADANG

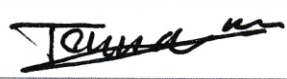
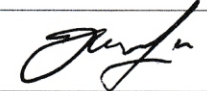
(Bambang Trisiswoyo K, 1410112058, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 81 halaman, 2018)

ABSTRAK

Narapidana wanita bukan lah hama atau sampah masyarakat, narapidana wanita merupakan bagian dari masyarakat. Selaku manusia ia mempunyai hak yang wajib di junjung tinggi oleh hukum dan pemerintah, seperti yang disebutkan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penyusun ingin meneliti tentang pelaksanaan hak-hak narapidana wanita untuk mencari perlindungan hukum meskipun berstatus sebagai narapidana, mereka berhak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Serta kendala-kendala apa saja yang ditemui oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan hak-hak narapidana wanita. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang secara deduktif diawali dari menganalisa dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif tentang pelaksanaan hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak-hak terhadap narapidana wanita belum terlaksana dengan baik, seperti tidak adanya bangunan permanen, belum adanya tempat beribadah semisal mushalla, perawatan jasmani yang kurang baik, layanan kesehatan yang tidak memadai, tidak adanya air bersih, pengajaran yang masih kurang, latihan kerja yang tidak didukung oleh sarana, menyampaikan keluhan, mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang. Hal ini bisa dilihat dengan masih adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya dukungan yang diberikan dari pusat, terbatasnya sumber daya manusia untuk dapat menjalankan program pembinaan narapidana wanita dengan baik, dan kurangnya anggaran untuk operasional pembinaan narapidana dan latihan kerja bagi narapidana. Disarankan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar menyelesaikan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang, mengkaji ulang anggaran lembaga pemasyarakatan dan melakukan penambahan, seperti fasilitas untuk beribadah, poliklinik dan fasilitas lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang. Serta melakukan monitoring evaluasi untuk mengetahui kondisi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang.

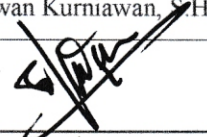
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama terang	Tenofrimer, S.H., M.H.	Iwan Kurniawan, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana : **Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: